

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jumlah calon pekerja Indonesia setiap tahun selalu meningkat, hal ini tentunya membutuhkan lapangan pekerjaan yang dapat memenuhi jumlah pekerja di Indonesia guna menekan angka pengangguran. Salah satu lapangan pekerjaan yang diminati oleh pekerja Indonesia adalah menjadi pekerja migran.¹ Berdasarkan data dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) penempatan PMI pada tahun 2023 (s.d Maret) berjumlah 72.784 pekerja.²

Data dari BP2MI menunjukkan bahwa negara Malaysia merupakan salah satu tujuan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan jumlah tertinggi. Sejak pada masa kemerdekaan Indonesia hingga tahun 1960-an, sebagian besar PMI telah banyak datang ke wilayah Malaysia.³ Hingga pada tahun 2023 (s.d Maret) tercatat 24.656 PMI yang terus berdatangan ke Malaysia,⁴ dan penyebaran PMI dengan jumlah besar di Malaysia salah satunya terletak pada wilayah Sabah.⁵

¹ “Kerja di luar negeri? Pastikan menjadi Pekerja Migran Indonesia yang Prosedural,” Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, diakses pada 15 Juni 2023, Kerja di luar negeri? Pastikan menjadi Pekerja Migran Indonesia yang Prosedural. | Website Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam (kemenkumham.go.id).

² “Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Maret 2023,” BP2MI, diakses pada 15 Juni 2023, BP2MI | BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

³ “Sejarah BP2MI,” BP2MI, diakses pada 24 Mei 2023, BP2MI | BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

⁴ “Data Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Maret 2023,” BP2MI

⁵ Anita, Darwis dan Aswin B., “Kerjasama Indonesia – Malaysia dalam Peningkatan Taraf Pendidikan Anak TKI di Negeri Sabah,” Hasanuddin Journal of International Affairs 1, no.2 (2021) : 200.

Tingginya penyebaran PMI di Sabah juga mendorong anak PMI ikut menetap di sana.⁶ Anak PMI merupakan anak berusia 1 – 18 tahun yang orang tuanya adalah pekerja migran Indonesia.⁷ Namun tidak semua anak PMI di Sabah memiliki dokumen kependudukan resmi, hal ini dikarenakan banyak PMI yang menikah serta membawa keluarga dari Indonesia secara legal maupun ilegal. Selain itu juga ada keluarga PMI yang telah menetap dalam kurun waktu yang lama namun tidak memiliki dokumen keimigrasian, identitas kependudukan serta kartu keluarga.⁸

Keberadaan anak PMI di Sabah dalam usia sekolah secara tidak langsung membutuhkan pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan.⁹ Namun dengan adanya permasalahan identitas kependudukan yang dialami oleh anak PMI akhirnya menjadi hambatan dalam mengakses pendidikan. Selain itu Malaysia sebagai negara yang banyak menerima tenaga kerja asing, juga menetapkan persyaratan bagi anak warga negara asing yang akan mengakses pendidikan di sekolah Malaysia, yaitu harus memiliki dokumen kependudukan, paspor orang tua siswa berstatus sebagai pekerja profesional seperti perwakilan negara atau salah satu orang tua siswa merupakan warga negara Malaysia.¹⁰

Persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah Malaysia ternyata belum optimal dalam mengupayakan akses pendidikan formal bagi anak PMI di sekolah

⁶ Anna Yulia Hartati dan Rofi'atul Andawiyah, "Diplomasi Indonesia dalam Menangani Masalah Pendidikan Anak TKI di Sabah Malaysia," SPEKTRUM 12, no.2 (2020) : 3.

⁷ "Tuntaskan Pendidikan Bagi Anak TKI, 115 Guru Indonesia Dikirimkan," Kemendikbud, diakses pada 26 Juli 2023, [Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan » Republik Indonesia \(kemendikbud.go.id\)](https://kemendikbud.go.id).

⁸ Anita, Darwis dan Aswin B., "Kerjasama Indonesia – Malaysia dalam Peningkatan Taraf Pendidikan Anak TKI di Negeri Sabah," 202.

⁹ Cicilia Anggi Sholina, "Pemenuhan Hak-Hak Asasi Anak Tenaga Kerja Indonesia di Perkebunan Sawit di Wilayah Tawau, Sabah, Malaysia," Jurnal Pembangunan Manusia 3, no.1 (2022) : 3.

¹⁰ Muhammad Nizar Hidayat dan Nur Hariyani, "Mewujudkan Pemerataan Pendidikan : Studi Kasus Community Learning Center (CLC) di Perbatasan Indonesia-Malaysia," Global Focus 2, no.2 (2022) : 140.

Malaysia, karena status pekerjaan PMI di Sabah adalah non-profesional berupa buruh migran Indonesia.¹¹ Melihat permasalahan pendidikan anak PMI yang begitu sulit, akhirnya pada tahun 2008 Pemerintah Indonesia bersama Pemerintah Malaysia sepakat untuk mendirikan Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) untuk memberikan layanan pendidikan kepada seluruh anak Indonesia yang berada di Sabah.¹² SIKK menyediakan layanan jenjang pendidikan mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) hingga Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). SIKK juga menjadi induk bagi layanan pendidikan alternatif berupa *Community Learning Center* (CLC).¹³ Namun, letak SIKK yang berpusat di ibu kota Sabah ternyata tidak dapat menjangkau seluruh anak PMI yang berada di perkebunan sawit.¹⁴ Sehingga hal ini masih menjadi hambatan bagi anak PMI untuk mengakses pendidikan, dikarenakan jarak tempuh yang begitu jauh dan daya tampung peserta didik yang terbatas.¹⁵

Berdasarkan situasi tersebut, pada tahun 2011 Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) mendirikan *Community Learning Center* (CLC) untuk menjangkau seluruh anak PMI yang berada di perkebunan sawit,¹⁶ dan fasilitas

¹¹ Nur Hariyani, "Impelementasi *Community Learning Center* (CLC) dalam Menangani Permasalahan Pendidikan Anak Buruh Migran Indonesia di Sabah," eJournal Ilmu Hubungan Internasional 79, no.4 (2022) : 679.

¹² "Sejarah Pendirian Sekolah Kota Kinabalu," Sekolah Indonesia Kota Kinabalu Official Website, diakses pada 06 Juli 2023, SEJARAH SIKK - SIKK (silnkotakinabalu.sch.id).

¹³ "SMA Terbuka Jarak Jauh (TJJ)," Sekolah Indonesia Kota Kinabalu Official Website, diakses pada 18 Juni 2023, SMA TERBUKA JARAK JAUH (TJJ) - SIKK (silnkotakinabalu.sch.id).

¹⁴ Nur Hariyani, "Impelementasi *Community Learning Center* (CLC) dalam Menangani Permasalahan Pendidikan Anak Buruh Migran Indonesia di Sabah," 698.

¹⁵ "Layanan Pendidikan *Community Learning Center* (CLC) di Wilayah Sabah dan Sarawak, Malaysia," Sekolah Indonesia Kota Kinabalu Official Website, diakses pada 18 Juni 2023, COMMUNITY LEARNING CENTER (CLC) - SIKK (silnkotakinabalu.sch.id)

¹⁶ Rahmadi Diliawan and Amy Yayuk Sri Rahayu, "Collaborative Governance in Fulfilling Rights of Basic Education of Indonesia Migrant Workers' Children in East Malaysia," (2018): 21. . Qouted in Defny Holidin, Fatimah Muchtar and Maria R.U.D Tambunan, *Advancing Policy*,

jenjang pendidikan yang disediakan oleh CLC terbatas pada SD dan SMP. Meskipun demikian, terbentuknya CLC memberikan peran besar dalam pendidikan anak PMI yang berada di perkebunan sawit. Tercatat pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) tahun 2022, CLC pada jenjang SD berjumlah 13.782 peserta didik dan jenjang SMP berjumlah 5.005 peserta didik.¹⁷

Sejak didirikan SIKK dan CLC, lulusan SMP di Sabah terus mengalami peningkatan. Akan tetapi jumlah lulusan SMP tidak setara dengan kapasitas jenjang SMA yang tersedia di SIKK. Hal ini menjadi hambatan bagi lulusan SMP di Sabah untuk melanjutkan pendidikan.¹⁸ Sebagai bentuk solusi dari hambatan ini, pada tahun 2013 SIKK mulai mengirim anak PMI ke Indonesia untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA. Hal ini didukung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) dengan memberikan kesempatan anak PMI untuk menempuh pendidikan pada jenjang SMA dan SMK terbaik di Pulau Jawa.¹⁹

Dukungan yang diberikan oleh Kemendikbud hanya terbatas pada 500 siswa,²⁰ sehingga hal ini juga tidak dapat menampung seluruh anak PMI lulusan SMP yang berada di Sabah. Belum maksimalnya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui SIKK dalam menyediakan fasilitas pendidikan untuk anak PMI di Sabah, serta hambatan Pemerintah Indonesia dalam menyediakan pengurusan dokumen izin keluar dari negara Malaysia bagi seluruh

Governance, and Innovation in Digital Ecosystems: A Multidisciplinary Approach (Depok, FIA UI Press, 2018), 21.

¹⁷ "Layanan Pendidikan *Community Learning Center* (CLC) di Wilayah Sabah dan Sarawak, Malaysia," Sekolah Indonesia Kota Kinabalu Official Website

¹⁸ "SMA Terbuka Jarak Jauh (TJJ)," Sekolah Indonesia Kota Kinabalu Official Website

¹⁹ "Siswa ADEM Akui Kebermanfaatan Program Afirmasi," PUSLAPDIK Kemendikbudristek, diakses pada 20 Juni 2023, Siswa ADEM Akui Kebermanfaatan Program Afirmasi - Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (kemdikbud.go.id).

²⁰ "SMA Terbuka Jarak Jauh (TJJ)," Sekolah Indonesia Kota Kinabalu Official Website

anak PMI lulusan SMP di Sabah yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA di Indonesia akhirnya mendorong aktor lain selain negara berupa yayasan atau *Non-Governmental Organization* (NGO) yang bertujuan untuk membantu pemerintah dalam memberikan akses pendidikan bagi anak PMI ke jenjang SMA.

Sabah Bridge (SB) merupakan NGO yang dibentuk pada tahun 2014, dan diinisiasi oleh tenaga pendidik dari Indonesia yang berada di Sabah. Hal ini sebagai bentuk keprihatinan tenaga pendidik dari Indonesia terhadap status anak-anak lulusan SMP yang tidak melanjutkan pendidikan. SB berfokus pada pemberian layanan pendidikan bagi anak-anak PMI yang tidak mendapatkan pendidikan di Malaysia.²¹ Sejak tahun 2015-2020 SB telah memberikan fasilitas pendidikan kepada lebih dari 700 anak PMI untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA di Indonesia.²²

Pada tahun 2017 SB mendapatkan penghargaan dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, yaitu "*The Hassan Wirajuda Awards*" karena SB dianggap sebagai komunitas yang peduli terhadap hak asasi pendidikan anak-anak PMI di luar negeri.²³ Dari hal ini dapat dilihat bahwa SB memiliki peran yang penting dalam membantu Pemerintah Indonesia untuk memberikan akses pendidikan bagi anak PMI. Berdasarkan hal tersebut, maka upaya yang dilakukan oleh SB dalam membantu Pemerintah Indonesia untuk menyediakan akses pendidikan bagi anak PMI di Sabah menarik untuk diteliti. Penelitian ini akan difokuskan pada upaya SB sebagai NGO yang membantu Pemerintah Indonesia

²¹ Muslihudin M., Rosazman H., Tyas R.W., and Jarot S., "The Role of Non-Government Organizations in the Education of Migrant Workers' Children in Sabah Malaysia," *International Conference on Politics, Social, and Humanities Science, KnE Social Science* (2023) : 368.

²² "Aris Prima, S.T.," Alumni Universitas Gadjah Mada, diakses pada 24 Juni 2023, Aris Prima, S.T. – Portal Alumni Universitas Gadjah Mada (ugm.ac.id).

²³ Sabah Bridge, Facebook post, 5 November 2020, diakses pada 24 Juni 2023, Facebook.

dalam menyediakan akses pendidikan bagi anak PMI yang berada di Sabah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Upaya Pemerintah Indonesia dalam memberikan akses pendidikan anak PMI di Sabah melalui SIKK dan CLC, telah meluluskan peserta didik dalam jumlah yang besar setiap tahunnya. Namun SIKK sebagai sekolah induk tidak memiliki daya tampung yang mencukupi untuk jenjang SMA, hal ini menjadi hambatan bagi anak PMI yang telah lulus SMP untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Bukan hanya itu, dalam proses pengembalian anak PMI dari Sabah ke Indonesia membutuhkan special pass sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi agar dapat keluar dari Malaysia secara resmi. Namun, jumlah anak PMI yang akan kembali ke Indonesia setiap tahunnya selalu mencapai jumlah yang besar. Pemerintah Indonesia tidak dapat menangani hal, sehingga hal ini juga menjadi hambatan yang dialami oleh Pemerintah Indonesia dalam menyediakan akses pendidikan untuk anak PMI di Sabah. Dari hambatan tersebut akhirnya muncul NGO seperti *Sabah Bridge (SB)* untuk membantu Pemerintah Indonesia dalam menyediakan akses pendidikan bagi anak PMI ke jenjang pendidikan selanjutnya. Pelaksanaan SB sejak tahun 2015-2020 telah memberikan fasilitas pendidikan kepada lebih dari 700 anak PMI untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya di Indonesia, dan SB telah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, yaitu "*The Hassan Wirajuda Awards*" karena SB dianggap sebagai komunitas yang peduli terhadap hak asasi pendidikan anak-anak PMI di luar negeri. Berdasarkan fakta

tersebut, menarik untuk diteliti bagaimana upaya SB dalam membantu Pemerintah Indonesia dalam menyediakan akses pendidikan untuk anak PMI ke jenjang SMA.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari latar belakang serta rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana upaya SB membantu Pemerintah Indonesia dalam menyediakan akses pendidikan bagi anak PMI yang berada di Sabah?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan upaya SB dalam membantu Pemerintah Indonesia dalam menyediakan akses pendidikan bagi anak PMI yang berada di Sabah.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis dan pembaca baik secara akademik dan praktik, yaitu:

1. Secara akademik, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk mengetahui bagaimana aktor selain negara berupa NGO, yaitu *Sabah Bridge* dalam menyediakan akses pendidikan bagi anak PMI yang berada di Sabah.
2. Secara praktik, penelitian ini dapat memberikan bahan pertimbangan bagi Pemerintah Indonesia dan Malaysia serta jajarannya, dan juga NGO lainnya untuk dapat membuat kebijakan dalam pemberian akses pendidikan bagi anak PMI di Sabah.

1.6 Tinjauan Pustaka

Dalam menjawab pertanyaan penelitian, peneliti berusaha menghimpun sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber dan menemukan beberapa referensi yang peneliti jadikan sebagai acuan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

Referensi pertama adalah penelitian yang berjudul “Collaborative Governance in Fulfilling Right of Basic Education of Indonesian Migrant Workers’ Children in East Malaysia” yang ditulis oleh Rahmadi Diliawan dan Amy Yayuk Sri Rahayu.²⁴ Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana dua negara melakukan kolaborasi atau kerja sama yang dijelaskan dalam *model of collaborative* oleh Ansell & Gash. Disebutkan terdapat sepuluh langkah yang dilakukan suatu negara dalam melakukan kolaborasi dengan negara lain, diantaranya yaitu:

- 1) *Power – Resource – Knowledge Asymmetris*, Anshell & Gash menjelaskan dalam kondisi ini terdapat kondisi yang tidak seimbang dan mendorong kedua negara untuk melakukan kerja sama;
- 2) *Incentives for and Constraints on Participation*, dijelaskan bahwa dorongan dan kendala yang dialami oleh pihak bersangkutan akan mendorong dan memaksa aktor untuk semakin dekat dan melakukan kerja sama atau berkolaborasi;
- 3) *Prehistory of Cooperation and Conflict*, dalam model ini menjelaskan mengenai sejarah dari suatu hubungan kerja sama dan sejarah dari suatu

²⁴ Diliawan, Rahmadi and Rahayu, Amy Yayuk Sri, “Collaborative Governance in Fulfilling of Basic Education of Indonesian Migrant Workers’ Children in East Malaysia,” 15 – 25.

kondisi konflik antara aktor, yang mana hal ini akan mempengaruhi tingkat kepercayaan satu aktor terhadap aktor lainnya dalam melakukan kerja sama;

- 4) *Facilitative Leadership*, dijelaskan bahwa suatu pemimpin harus bisa mencari kesempatan untuk berdialog yang akan menimbulkan kepercayaan, dan hingga akhirnya akan terbentuk suatu kesepakatan dalam peraturan;
- 5) *Face – to Face Dialogue*, dalam hal ini disebutkan bahwa komunikasi bertatap muka secara langsung merupakan komunikasi yang paling penting untuk menyampaikan maksud dari kedua pihak, dan komunikasi secara langsung ini tidak hanya dilakukan oleh kepala pemerintahan saja;
- 6) *Trust Building*, disebutkan bahwa keinginan para aktor membangun kembali kepercayaan antar aktor;
- 7) *Commitment to Process*, yang dimaksud adalah peran para aktor dalam mengawal dan mengontrol proses kerja sama;
- 8) *Shared Understanding*, dijelaskan bahwa antar aktor saling merumuskan pemahaman dan menjadi formula yang saling menguntungkan, lalu disebutkan bahwa pengembangan pemahaman bersama sebagai hal yang besar dalam proses kerja sama;
- 9) *Intermediate Outcomes*, merupakan riwayat dari sebuah kerja sama dan program yang berkelanjutan;
- 10) *Institutional Design*, merupakan sistem institusi yang mampu memfasilitasi proses kerja sama.

Diliawan dan Rahayu menjabarkan bagaimana Indonesia dan Malaysia pada akhirnya dapat menyepakati kerja sama untuk menangani permasalahan pendidikan anak PMI di Malaysia bagian timur. Melalui sepuluh model kolaborasi dengan menjelaskan setiap langkah yang diambil oleh Indonesia dalam menangani masalah pendidikan anak PMI, pembahasan dimulai dari sejarah hubungan Indonesia dan Malaysia hingga terbentuk program yang berkelanjutan.

Tulisan ini membantu peneliti dalam melihat bagaimana kerja sama kedua negara terus mengalami perkembangan yang pada akhirnya dapat membantu memenuhi hak pendidikan anak PMI di Sabah. Perbedaan antara tulisan ini dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada konsep dan fokus penelitian, Diliawan dan Rahayu menggunakan konsep model *collaborative governance* oleh Anshell & Gash. Sedangkan peneliti menggunakan konsep peran NGO, fokus peneliti adalah bagaimana *Sabah Bridge* membantu Pemerintah Indonesia menyediakan akses pendidikan bagi anak PMI di Sabah.

Referensi selanjutnya yaitu tulisan dari Anna Yulia Hartati dan Rofi'atul Andawiyah yang berjudul "Diplomasi Indonesia Dalam Menangani Masalah Pendidikan Anak TKI di Sabah Malaysia".²⁵ Dalam penelitian Yulia dan Rofi'atul menjelaskan bagaimana diplomasi yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam menangani masalah pendidikan anak PMI di Sabah. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia, hasil dari MoU ini adalah kesepakatan untuk membentuk Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK).

²⁵ Anna Yulia Hartati dan Rofi'atul Andawiyah, "Diplomasi Indonesia Dalam Menangani Masalah Pendidikan Anak TKI di Sabah Malaysia," 1-19.

Selain itu melalui Konsulat Jenderal Kota Kinabalu (KJRI KK), Pemerintah Indonesia juga mengupayakan penerbitan dokumen kependudukan berupa paspor, surat akta lahir dan surat pernikahan yang diterbitkan dalam acara sidang isbath nikah. Dari upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui perwakilan yang berada di Malaysia, sebagai bentuk *soft power* dinilai berhasil karena telah melakukan kerja sama antar pemerintah untuk mendirikan SIKK, CLC dan berbagai upaya lainnya yang telah disebutkan sebelumnya.

Tulisan ini membantu peneliti untuk melihat bagaimana upaya Indonesia melalui *soft diplomacy* dan hasil yang didapatkan dari upaya yang telah dilakukan Indonesia. Perbedaan tulisan ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah fokus penelitian, tulisan ini berfokus pada negara sebagai aktor yang menangani masalah pendidikan anak PMI di Sabah, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah berfokus pada aktor selain negara berupa NGO yang membantu Pemerintah Indonesia menyediakan akses pendidikan bagi anak PMI di Sabah.

Referensi berikutnya berjudul “Pemenuhan Hak-Hak Asasi Anak Tenaga Kerja Indonesia di Perkebunan Sawit di Wilayah Tawau, Sabah, Malaysia” oleh Cicilia Anggi Sholina.²⁶ Penelitian ini menjelaskan bahwa perlindungan terhadap anak-anak harus didapatkan di manapun keberadaannya. Terdapat permasalahan terkait anak PMI yang tidak memiliki sertifikat lahir atau kewarganegaraan, yang mana hal ini akan berdampak pada akses kebutuhan dasar sang anak berupa pendidikan dan jaminan perlindungan lainnya.

²⁶ Cicilia Anggi Sholina, “Pemenuhan Hak-Hak Asasi Anak Tenaga Kerja Indonesia di Perkebunan Sawit di Wilayah Tawau, Sabah, Malaysia,” 1-18.

Masalah anak PMI tidak memiliki sertifikat lahir ini kemudian diupayakan oleh pihak-pihak terkait seperti Konsulat Republik Indonesia (KRI) Tawau dan perusahaan sawit yang turut mengupayakan hak-hak untuk anak PMI yang berada di wilayah Tawau. Upaya yang dilakukan oleh KRI Tawau yaitu membuat *Community Learning Center* (CLC) yang mendorong akses pendidikan untuk anak PMI. Se lain itu, KRI juga melakukan sosialisasi dan penyuluhan terkait pentingnya pendidikan, akses layanan kesehatan, larangan untuk mengajak anak bekerja yang masih dibawah umur, hingga anjuran untuk tidak menikahkan anak pada usia dini. Perusahaan sawit turut mengupayakan hak anak dengan menyediakan pengajar dan kurikulum yang komprehensif di CLC, seperti isu kesehatan reproduksi, anti-narkoba, serta keagamaan.

Meskipun demikian, hambatan dalam mengupayakan hak-hak untuk anak PMI justru datang dari kesadaran orang tua untuk memenuhi hak-hak anaknya, seperti mengajak anaknya untuk bekerja di ladang sawit. Tulisan ini membantu peneliti untuk melihat upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia serta perusahaan sawit yang ada di Tawau dalam memberikan hak-hak anak PMI, serta hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan pemenuhan hak untuk anak PMI di Tawau. Perbedaan tulisan ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah fokus penelitian, tulisan ini berfokus pada pemenuhan seluruh hak-hak anak PMI yang berada di Sabah. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan hanya berfokus pada pemenuhan hak pendidikan dan penyediaan akses pendidikan lanjutan untuk anak PMI yang ada di Sabah.

Lanjut pada referensi berikutnya yaitu tulisan oleh Muhammad Nizar Hidayat dan Nur Hariyanti yang berjudul “Mewujudkan Pemerataan Pendidikan:

Studi Kasus *Community Learning Center* (CLC) di Perbatasan Indonesia-Malaysia”.²⁷ Tulisan ini menjelaskan terkait pembentukan serta pelaksanaan CLC, dimana pembentukan CLC sebagai solusi dari Pemerintah Indonesia untuk anak buruh migran yang berada di perkebunan sawit yang tidak dapat mengakses Sekolah Indonesia Kota Kinabalu karena faktor lokasi yang jauh dan daya tampung yang terbatas.

Sejak berdiri pada tahun 2011, CLC telah menjalankan berbagai program dalam memberikan layanan pendidikan bagi anak buruh migran Indonesia di Sabah. Pelaksanaan CLC ini melibatkan tiga aktor, yaitu Pemerintah Indonesia, Pemerintah Malaysia dan perusahaan kelapa sawit di Sabah. Pelaksanaan CLC sejak tahun 2011 hingga 2019 sudah terdapat 250 CLC yang tersebar pada beberapa daerah di Sabah.

Tulisan ini membantu peneliti untuk melihat bagaimana keberadaan CLC sebagai bentuk keselarasan kepentingan antar aktor dalam kasus pemenuhan hak pendidikan untuk anak buruh migran Indonesia yang berada di Sabah. Kepentingan Pemerintah Indonesia dalam hal ini adalah untuk memberikan akses pendidikan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Malaysia, sedangkan kepentingan Pemerintah Malaysia adalah menjaga kedaulatan dalam otoritas regulasi yang terdapat dalam wilayahnya. Selain itu, kepentingan perusahaan kelapa sawit adalah untuk menjaga stabilitas bisnis, dengan cara mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh kedua negara bersangkutan.

²⁷ Muhammad Nizar Hidayat dan Nur Hariyani, “Mewujudkan Pemerataan Pendidikan : Studi Kasus *Community Learning Center* (CLC) di Perbatasan Indonesia-Malaysia,” 139-147.

Perbedaan antara tulisan ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah terletak pada fokus penelitiannya, tulisan ini lebih memfokuskan pada implemetasi CLC dalam mewujudkan pemerataan pendidikan bagi anak PMI di Sabah, sedangkan fokus penelitian yang peneliti lakukan adalah peran NGO yaitu *Sabah Bridge* dalam membantu Pemerintah Indonesia menyediakan akses pendidikan bagi anak PMI yang berada di Sabah, dari jenjang SMP ke jenjang pendidikan SMA.

Referensi terakhir adalah tulisan berjudul “The Role of Non-Governmental Organizations in the Education of Migrant Workers’ Children in Sabah Malaysia” oleh Muslihudin, Rosazman H., Tyas R. Wulan, dan Jarot S.²⁸ Tulisan ini menjabarkan dua NGO yang membantu pemerintah dalam memberikan akses pendidikan untuk anak PMI di Sabah, yaitu NGO Humana dan NGO *Sabah Bridge*. NGO Humana yang telah berdiri sejak tahun 1991 yang menyediakan sekolah untuk anak-anak yang tidak memiliki dokumen kependudukan dan tidak dapat mengakses pendidikan di Sekolah Kerajaan Malaysia. Selain itu, *Sabah Bridge* merupakan NGO yang didirikan pada tahun 2014 untuk memberikan akses pendidikan anak lulusan SMP yang berada di Sabah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA di Indonesia.

Tulisan ini membantu peneliti melihat bagaimana peran yang dilakukan oleh NGO Humana dan NGO *Sabah Bridge* dalam memberikan akses pendidikan bagi anak PMI yang berada di Sabah. Perbedaan tulisan ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu peran NGO ini hanya dijabarkan secara umum, seperti

²⁸ Muslihudin M., Rosazman H., Tyas R.W., and Jarot S., “The Role of Non-Government Organizations in the Education of Migrant Workers’ Children in Sabah Malaysia,” 364-370.

menjelaskan tingkat pendidikan yang disediakan oleh kedua NGO, sumber daya manusia dari pelaksana NGO, kurikulum yang dijalankan, wilayah pelaksanaan NGO, sumber dana, jumlah anak yang telah diberikan akses pendidikan, dan tipe NGO tersebut. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah berfokus pada bagaimana NGO *Sabah Bridge* dalam menyediakan akses pendidikan untuk anak PMI dengan menggunakan konsep cara bekerja NGO oleh P.J. Simmons.

Dari tinjauan pustaka yang telah dijelaskan dan dipaparkan sebelumnya mengenai diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam menangani permasalahan pendidikan anak PMI di Sabah, pemerataan pendidikan melalui CLC, dan peran NGO dalam membantu Pemerintah Indonesia dalam memberikan akses pendidikan bagi anak PMI di Sabah, diantaranya : penelitian Rahmadi Diliawan dan Amy Yayuk Sri Rahayu yang berjudul “Collaborative Governance in Fulfilling Right of Basic Education of Indonesian Migrant Workers’ Children in East Malaysia”, Anna Yulia Hartati dan Rofi’atul Andawiyah yang berjudul “Diplomasi Indonesia Dalam Menangani Masalah Pendidikan Anak TKI di Sabah Malaysia”, Cicilia Anggi Sholina yang berjudul “Pemenuhan Hak-Hak Asasi Anak Tenaga Kerja Indonesia di Perkebunan Sawit di Wilayah Tawau, Sabah, Malaysia”, Muhammad Nizar Hidayat dan Nur Hariyanti yang berjudul “Mewujudkan Pemerataan Pendidikan: Studi Kasus *Community Learning Center* (CLC) di Perbatasan Indonesia-Malaysia”, dan yang terakhir adalah tulisan berjudul “The Role of Non-Governmental Organizations in the Education of Migrant Workers’ Children in Sabah Malaysia” oleh Muslihudin, Rosazman H., Tyas R. Wulan, dan Jarot S. Namun penelitian terdahulu belum ada yang

membahas terkait fokus penelitian ini sehingga peneliti memutuskan untuk meneliti isu ini dengan menjadikan tinjauan pustaka sebelumnya sebagai referensi dalam penelitian ini.

1.7 Kerangka Konseptual

Penggunaan teori atau konsep dalam sebuah penelitian merupakan hal yang sangat dibutuhkan sebagai acuan dalam menganalisis pembahasan yang ada, serta membatu peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian yang dipaparkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep cara bekerja *Non-Governmental Organizations* (NGO) sebagai kerangka konseptual dan sebagai pisau analisis dalam menjawab pertanyaan penelitian yang dipaparkan.

1.7.1 Cara Bekerja *Non-Governmental Organizations* (NGO)

Pada tahun 1990-an NGO telah ditetapkan sebagai studi pembangunan dalam bidang penelitian dan pengajaran. Seiring berjalannya waktu, NGO juga menjadi subjek studi dalam hubungan internasional. Definisi NGO secara umum adalah organisasi yang peduli dengan suatu perubahan sosial, politik atau ekonomi dan memberikan dukungan kepada orang-orang yang membutuhkan.²⁹ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan NGO sebagai entitas nirlaba yang anggotanya terdiri dari masyarakat atau asosiasi masyarakat suatu negara, kegiatan yang dijalankan sesuai dengan kehendak kolektif para anggota sebagai respon terhadap kebutuhan para anggota entitas tersebut. NGO juga didefinisikan

²⁹, David Lewis, Nazneen Kanji and Nuno S. Themudo, *Non-Governmental Organizations and Development* (New York, NY : Routledge, 2021), 3.

sebagai organisasi sukarela swasta, organisasi masyarakat sipil dan sektor independen.³⁰

Anna C. Vakil mendefinisikan NGO sebagai organisasi swasta yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang kurang beruntung.³¹ David Lewis, Nazneen Kanji dan Nuno S. Themudo mendefinisikan NGO sebagai cakupan dari bentuk keanggotaan seperti organisasi berbasis masyarakat, organisasi individu, juga NGO sebagai perantara yang berkerja sama dengan komunitas lainnya. NGO juga biasa disebut sebagai organisasi pendukung masyarakat.³² Dari definisi yang telah dijelaskan sebelumnya, bisa ditarik definisi dari NGO adalah kelompok individu suatu negara yang peduli dengan perubahan sosial dalam memberikan dukungan kepada orang-orang yang membutuhkan dan kurang beruntung, serta sebagai perantara yang bekerjasama antara orang-orang yang membutuhkan dengan komunitas lainnya.

Dalam pelaksanaan NGO, terdapat empat cara bekerja yang dijalankan oleh sebuah NGO dalam mempengaruhi pemerintah, lembaga multilateral, perusahaan nasional dan multinasional. Dalam tulisan P.J. Simmons yang berjudul "*Learning to Live with NGO*" dijabarkan terdapat empat cara bekerja sebuah NGO, yaitu:³³

³⁰ P.J. Simmons, "Learning to Live with NGOs," *Foreign Policy*, no.112 (1998) : 83.

³¹ Anna C. Vakil, "Confronting the Classification Problem: Toward a Taxonomy of NGOs," *World Development* 25, no. 12 (1997) : 2060.

³², David Lewis, Nazneen Kanji and Nuno S. Themudo, *Non-Governmental Organizations and Development*, 12.

³³ P.J. Simmons, *Learning to Live with NGOs*, 82-87.

1. *Setting Agenda* (Menetapkan Agenda)

Pada cara bekerja ini NGO dapat menetapkan agenda untuk menjalankan tugas. Agenda yang dirancang dan ditetapkan oleh NGO ini sesuai dengan solusi untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, serta bertujuan agar menjadi bahasan publik dan mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah. Dalam hal ini NGO juga mendorong pemerintah dan para pembuat kebijakan untuk memperhatikan isu yang terjadi pada masyarakat.

2. *Negotiating Outcomes* (Menegosiasikan Jalan Keluar)

Dalam menegosiasikan jalan keluar NGO dapat bertindak sebagai “ahli” dalam suatu isu. Dalam hal ini NGO dilihat sebagai entitas atau aktor lain yang merumuskan solusi dari suatu permasalahan ketika pemerintah suatu negara tidak dapat atau tidak optimal dalam menyelesaikan suatu masalah.

3. *Conferring Legitimacy* (Membangun Legitimasi)

Melalui agenda yang ditetapkan oleh NGO, kinerja NGO dapat menarik kepercayaan publik dan aktor lain. Hal ini dikarenakan NGO dapat memberikan pengaruh kepada masyarakat dalam membantu pemerintah menyelesaikan suatu isu masyarakat yang belum optimal pelaksanaannya.

4. *Implementing Solutions* (Menerapkan Solusi)

NGO dipercaya dapat menerapkan solusi dengan posisi netral dan efektif, dalam artian ini NGO tidak perlu menunggu birokrasi yang rumit untuk membuat suatu solusi dari isu yang terjadi dalam

masyarakat. NGO dinilai dapat memberikan bantuan secara masif dan terus-menerus tanpa campur tangan pemerintah, di sisi lain NGO juga banyak membantu pemerintah dalam menerapkan rezim serta norma internasional yang telah diadopsi oleh suatu negara lalu menjadi peraturan domestik.

Dari konsep yang telah dijabarkan mengenai cara bekerja NGO, nantinya peneliti akan menganalisis dengan cara mengaitkan konsep dengan agenda yang telah dilaksanakan oleh SB dalam akses pendidikan bagi anak PMI di Sabah. Sebelum melakukan analisis, peneliti akan memahami terlebih dahulu konsep yang dijabarkan oleh P.J. Simmons mengenai cara bekerja sebuah NGO.

Peneliti akan mendalami pengertian dan menginterpretasikan makna dari indikator cara bekerja NGO melalui contoh yang diberikan dalam artikel jurnal oleh penulis konsep. Peneliti juga akan mengumpulkan program-program serta upaya berupa kegiatan yang telah dilakukan oleh SB dalam membantu Pemerintah Indonesia menyediakan akses pendidikan untuk anak PMI dan mengelompokkan program serta kegiatan tersebut sesuai cara bekerja yang dijelaskan oleh P.J. Simmons.

1.8 Metodologi Penelitian

Dalam melakukan penelitian metodologi memiliki peran yang penting sebagai acuan dan prosedur yang akan digunakan oleh peneliti untuk memperoleh pengetahuan dari topik yang dibahas sebagai bahan dari kajian hubungan internasional.

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell pendekatan kualitatif sebagai suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.³⁴ Jenis penelitian ini adalah deskriptif karena peneliti akan banyak menggambarkan bagaimana cara bekerja SB dalam menyediakan akses pendidikan bagi anak PMI di Sabah dan melakukan interpretasi data sehingga dapat menjadi gambaran dari penelitian mengenai cara bekerja *Sabah Bridge* sebagai NGO yang membantu Pemerintah Indonesia dalam menyediakan akses pendidikan bagi anak PMI yang berada di Sabah.

1.8.2 Batasan Penelitian

Batasan penelitian digunakan agar penelitian ini tetap dalam lingkup pembahasannya dan tidak meluas ke berbagai bahasan yang nantinya akan menjauh dari pokok permasalahan, maka peneliti akan menetapkan batasan untuk penelitian ini dalam kurun waktu 2017 – 2023. Periode ini dipilih karena pada tahun 2017 SB mendapatkan penghargaan dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yaitu “*The Hassan Wirajuda Awards*” sebagai komunitas yang peduli terhadap hak pendidikan anak PMI di luar negeri. Selanjutnya tahun 2023 akhir batasan penelitian ini karena hingga tahun 2023 SB masih berjalan dan melakukan kegiatan sehingga data yang diperlukan masih relevan.

³⁴ John W. Creswell, *Qualitative Inquiry & Research Design* dalam Dr. Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal)* (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta Press : 2020), 19.

1.8.3 Unit Analisis dan Tingkat Analisis

Menurut Mohtar Mas' oed unit analisis atau variabel dependen merupakan objek yang perilakunya akan dideskripsikan, dijelaskan dan diramalkan.³⁵ Variabel dependen atau unit analisis dalam penelitian ini adalah upaya SB, karena upaya SB menjadi objek yang akan peneliti deskripsikan. Adapun unit eksplanasi atau variabel independen yang akan mempengaruhi dan berdampak terhadap unit analisis yang perilakunya akan diamati,³⁶ sehingga unit eksplanasi dalam penelitian ini adalah akses pendidikan anak PMI di Sabah.

Penentuan tingkat analisis dalam penelitian juga perlu untuk menemukan level analisis yang tepat, selain itu tingkat analisis juga membantu kita memilah-milah faktor yang harus ditekankan.³⁷ Mohtar Mas' oed mengidentifikasi lima tingkat analisis, diantaranya adalah individu, kelompok, negara-bangsa, kelompok negara bangsa dan sistem internasional.³⁸ Tingkat analisis penelitian ini berada pada tingkat kelompok karena masalah penelitian yang disoroti adalah upaya SB yang membantu Pemerintah Indonesia dalam menyediakan akses pendidikan bagi anak PMI yang berada di Sabah.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian sangat dibutuhkan untuk mengumpulkan fakta dan data yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ada. Dalam penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan

³⁵ Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi* (Jakarta : LP3S, 1990), 39.

³⁶ Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin Dan Metodologi*, 39.

³⁷ Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin Dan Metodologi*, 41.

³⁸ Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin Dan Metodologi*, 46.

data yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Sedangkan data sekunder merupakan data yang didapatkan dari berbagai sumber yang sudah ada dan dapat diakses melalui media berita dan artikel jurnal.

1. Data Primer

Data primer merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dari objek yang ingin diteliti seperti wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, observasi dan angket.³⁹ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara sebagai teknik pengumpulan data primer. Wawancara adalah suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interview*) dengan cara terstruktur maupun tidak terstruktur, serta dapat melalui komunikasi secara langsung (tatap muka atau menggunakan telepon).⁴⁰ Teknik wawancara terstruktur dilakukan dengan terlebih dahulu peneliti menyusun instrumen pedoman wawancara, sedangkan teknik wawancara tidak terstruktur adalah tidak menyiapkan pedoman wawancara yang telah disusun secara lengkap dalam pengumpulan data.

Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk memperoleh data sebanyak-banyaknya dari narasumber yang telah membantu peneliti dalam menemukan hasil penelitian. Dalam mendukung data primer penelitian ini, peneliti telah mewawancarai pihak SB untuk menganalisis upaya SB dalam membantu Pemerintah Indonesia memberikan akses pendidikan anak PMI yang berada di Sabah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA di Indonesia.

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2013), 137.

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 138.

Selain itu peneliti juga mewawancarai pihak Pemerintah Indonesia melalui perwakilan KRI Tawau, serta siswa yang mendapatkan bantuan SB untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA di Indonesia dan masyarakat atau orang tua siswa yang mendapatkan bantuan dari SB.

Selain wawancara, peneliti juga mendapatkan data primer dari berbagai *website* resmi Pemerintah Indonesia, berupa laporan penempatan PMI dalam laporan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Dapodik, dan Kemendikbud. Selain itu *website* resmi SIKK *Official Website* dan sumber lainnya yang didapatkan dari pihak SB mengenai jumlah penempatan anak PMI yang mendapatkan bantuan dari SB untuk melanjutkan jenjang pendidikan SMA di Indonesia. Peneliti juga mendapatkan data berupa Laporan Akhir Tahun oleh Divisi CLC dari salah satu pihak yang peneliti jadikan narasumber dalam penelitian ini.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan metode pengumpulan data dari sumber yang didapatkan secara tidak langsung. Data sekunder didapatkan melalui literatur akademik seperti artikel jurnal, berita, *website* yang diakses melalui *platform* media masa.⁴¹ Dalam mengumpulkan data sekunder ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa *library research* atau studi kepustakaan.

Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang relevan dan memiliki korelasi dengan masalah pendidikan anak PMI di Sabah Malaysia dan peran NGO yang turut terlibat dalam penyelesaian masalah

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 137.

pendidikan anak PMI yang ada di Sabah. Pengumpulan berbagai data yang dijelaskan akan dilakukan dengan menggunakan kata kunci, seperti: masalah pendidikan TKI di Sabah, pendidikan anak TKI, diplomasi Indonesia dalam masalah pendidikan anak PMI, peran KJRI dalam pendidikan anak PMI di Sabah, peran NGO dalam masalah pendidikan anak PMI di Sabah dan Sekolah Indonesia Kota Kinabalu yang akan mempermudah penemuan data yang sesuai.

3. Triangulasi Data

Triangulasi data merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi data juga digunakan untuk menguji kredibilitas data, yaitu dengan mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.⁴² Dalam penelitian ini, subjek yang menjadi triangulasi penelitian ini adalah KRI Tawau dan masyarakat/orang tua siswa yang menerima bantuan SB serta siswa yang mendapat bantuan dari SB. Tiga subjek triangulasi data ini dipilih karena sesuai dengan permasalahan penelitian ini, dimana peneliti melihat upaya SB membantu Pemerintah Indonesia dalam menyediakan akses pendidikan bagi anak PMI yang berada di Sabah, dan masyarakat/orang tua siswa yang mendapat bantuan dari SB untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA di Indonesia sebagai subjek yang merasakan dampak dari upaya yang dilakukan oleh SB dalam mengupayakan akses pendidikan bagi anak PMI di Sabah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA di Indonesia.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 241.

Tabel 1.1 Daftar Informan

No.	Pihak	Nama	Keterangan
1	Konsulat Republik Indonesia Tawau	Wiryawan Prah Utomo	Pelaksana Fungsi Penerangan, Sosial dan Budaya
		Ferry Tri Ardiansyah	Staf Teknis Imigrasi
		Riky Riksmansyah	Koordinator Penghubung <i>Community Learning Center</i> (CLC)
2	<i>Sabah Bridge</i>	Choiriya Ulfah	Staf <i>Sabah Bridge</i>
3	Masyarakat	Bapak Muhd. Nurdin	Orang Tua Murid Penerima Bantuan SB
		Muhammad Farid	Anak PMI Penerima Bantuan SB

Dalam operasionalisasi kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini, data untuk menganalisis indikator *setting agenda* atau penetapan agenda didapatkan melalui wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada salah satu staf SB. Dari hasil wawancara ini peneliti melihat bahwa SB telah menetapkan agenda untuk mempengaruhi publik dan pemerintah. Selanjutnya, untuk menganalisis indikator *negotiating outcomes* juga didapatkan melalui wawancara, dan peneliti melihat bahwa SB telah melakukan negosiasi untuk merumuskan solusi dari permasalahan pendidikan anak PMI di Sabah.

Pada indikator *conferring legitimacy* dianalisis melalui data yang diperoleh oleh peneliti melalui wawancara, dan peneliti melihat bahwa kinerja SB telah menarik kepercayaan publik dan aktor lainnya. Hingga pada indikator

implementing solutions dianalisis menggunakan data yang diperoleh melalui wawancara dan terlihat bahwa SB menerapkan solusi dengan posisi netral.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Guna menganalisis data yang telah dikumpulkan, peneliti menggunakan proses menganalisis data yang dipaparkan oleh Miles, Huberman dan Saldana. Terdapat tiga alur analisis untuk menganalisis data dalam penelitian kualitatif, diantaranya:⁴³

1. Kondensasi Data

Kondensasi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, memusatkan atau mengabstraksi data yang didapatkan. Pada proses ini peneliti melakukan kondensasi data terkait masalah pendidikan anak PMI di Sabah dan peneliti akan mengumpulkan data mengenai bagaimana upaya SB membantu Pemerintah Indonesia dalam menyediakan akses pendidikan bagi anak PMI di Sabah.

2. Penyajian Data

Tahap kedua ini merupakan pengorganisasian dan penyusunan data yang memungkinkan penyimpulan atas suatu tindakan. Pada tahap ini peneliti akan menyajikan data dalam bentuk uraian yang bersifat naratif yang telah didapatkan melalui sumber primer dan sekunder mengenai upaya SB membantu Pemerintah Indonesia dalam menyediakan akses pendidikan bagi anak PMI di Sabah yang akan disajikan berdasarkan konsep cara bekerja NGO oleh P.J. Simmons.

⁴³ Matthew B.Miles, A.Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*, 3rd Edition (SAGE Publication, 2014), 4- 5.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir ini mengenai hasil dari penelitian ini berupa kesimpulan terhadap data yang telah dikumpulkan dan disajikan, untuk memudahkan penarikan kesimpulan yaitu dengan pengkategorian data yang telah disajikan berdasarkan empat indikator cara bekerja NGO yang dijabarkan oleh P.J. Simmons sehingga terlihat bagaimana upaya SB membantu Pemerintah Indonesia dalam menyediakan akses pendidikan bagi anak PMI di Sabah.

Pada bagian analisis data peneliti menganalisis empat cara bekerja NGO menurut P.J Simmons, dimana pada tahap ini akan terlihat bagaimana upaya SB membantu Pemerintah Indonesia dalam menyediakan akses pendidikan bagi anak PMI di Sabah. Analisis data dimulai dengan melakukan pemilihan indikator terlebih dahulu, indikator yang dipilih sesuai dengan konsep yang digunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian ini.

Pada indikator konsep cara bekerja NGO yang pertama yaitu *setting agenda*, pada bagian ini peneliti menemukan bahwa SB telah menetapkan agenda sebagai upaya menyediakan akses pendidikan bagi anak PMI yang berada di Sabah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA di Indonesia. Selanjutnya pada indikator *negotiating outcomes*, peneliti menganalisis bahwa SB menegosiasikan jalan keluar dari permasalahan pendidikan yang dialami oleh anak PMI yang berada di Sabah berupa negosiasi kepada Jabatan Imigresen Sabah agar memudahkan proses penerbitan *special pass*. Indikator selanjutnya yaitu *conferring legitimacy*, peneliti menemukan SB telah membangun legitimasi dari berbagai aktor dalam membantu Pemerintah Indonesia dalam menyediakan akses

pendidikan bagi anak PMI yang berada di Sabah. Indikator terakhir mengenai *implementing solutions*, pada indikator ini peneliti menemukan SB sebagai NGO dapat mengimplementasikan solusi dengan posisi netral tanpa menunggu birokrasi pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, yaitu berupa menjalin kerja sama dengan berbagai sekolah mitra pada delapan provinsi yang ada di Indonesia.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka dari penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dan sebagai bahan untuk menemukan *gap research*, kerangka konseptual yang digunakan sebagai pisau analisis data yang akan mendapatkan hasil penelitian, metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, batasan masalah penelitian, unit dan tingkat analisis penelitian teknik pengumpulan data, serta sistematika penulisan.

BAB II Akses Pendidikan Anak Pekerja Migran Indonesia di Malaysia

Pada bagian ini peneliti menjelaskan bagaimana permasalahan pendidikan anak pekerja migran Indonesia di Malaysia. Dimulai dari permasalahan akses pendidikan

formal bagi anak pekerja migran di sekolah Malaysia, identitas anak PMI di Sabah dan anak PMI yang putus sekolah.

BAB III Pemerintah Indonesia Menyediakan Akses Pendidikan

Bagi Anak PMI di Sabah

Bagian ini peneliti menjelaskan bagaimana upaya Pemerintah Indonesia dalam menyediakan akses pendidikan untuk anak PMI di Sabah. Dimulai dari pembentukan Sekolah Indonesia Kota Kinabalu, berdirinya *Community Learning Center*, hingga pengiriman anak PMI lulusan SMP di Sabah ke Indonesia untuk melanjutkan pendidikan jenjang SMA.

BAB IV Upaya *Sabah Bridge* Membantu Pemerintah Indonesia dalam Menyediakan Akses Pendidikan bagi Anak PMI di Sabah

Bab ini menyajikan hasil dari analisis serta menjelaskan bagaimana upaya yang dilakukan *Sabah Bridge* sebagai NGO dalam membantu Pemerintah Indonesia menyediakan akses pendidikan bagi anak PMI yang telah lulus dari jenjang pendidikan SMP di Sabah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA di Indonesia.

BAB V Penutup

Bab terakhir ini berisikan tentang rangkuman kesimpulan terpenting dan saran secara umum terkait penelitian topik ini.

